

RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Kota Banjarbaru, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Kelima Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu : **“Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib”**.

Dari misi kelima tersebut, pencapaian tujuan yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah **"Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat"** dengan sasaran **"Meningkatnya keamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat "**. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi Menjaga keamanan dan stabilitas daerah serta arah kebijakan Pengembangan wawasan kebangsaan.

Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara selaras sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Kegiatan SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pula sebagai pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2020

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan SAKIP adalah membantu SKPD dalam mencapai akuntabilitas sehingga dihasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tujuan kegiatan adalah agar seluruh Pelaksana Program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menerapkan akuntabilitas dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan ini telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru melalui program Peningkatan

Keamanan dan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Ketahanan Seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur serta Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Output kegiatan adalah laporan hasil pelaksanaan SAKIP per triwulan (4 laporan), laporan hasil Program dan Kegiatan per bidang Laporan Kinerja (1 laporan).
- b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah persentase rekomendasi perbaikan komponen pengungkit dan komponen hasil yang ditindak lanjuti dengan target 100 (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan ditindak lanjuti : jumlah Kegiatan x 100%.
- c. Sasaran (kinerja) adalah persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan dan Politik Kota Banjarbaru.
- d. Tujuan (dampak) adalah meningkatnya SAKIP di Badan Kesatuan dan Politik kota Banjarbaru untuk menunjang SAKIP Pemerintah Kota Banjarbaru dengan target Pemko Banjarbaru mendapat predikat A (predikat dari Kementerian PAN dan RB).

3. Waktu Pelaksanaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru melaksanakan Program dan Kegiatan selama 12 Bulan rata rata kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari dan seterusnya sampai bulan Desember 2020

4. Anggaran

Dana kegiatan SAKIP / Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.147.398.085,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).

5. Personil sesuai kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan/ PPTK dan PPK dengan Koordinasi Kepala Bidang untuk dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru. yang memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang SAKIP.

6. Rencana Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan SAKIP, dilakukan persiapan sebagai berikut

- a. Pembuatan SK Tim SAKIP
- b. Melakukan rapat intern dengan pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Mempersiapkan data untuk melaksanakan kegiatan.
- d. Mempersiapkan kelengkapan administrasi (RKA).
- e. Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Badan untuk panitia pelaksana (jika diperlukan)
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait pelaksanaan kegiatan .
- g. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan kepada kepala kesbangpol.
- h. Lain- lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode yang digunakan adalah dengan cara :

- a. Melakukan koordinasi ke bidang-bidang selaku pelaksana teknis kegiatan
- b. Melakukan rapat/ pertemuan dengan semua Kabid dan PPTK
- c. Melakukan Evaluasi/ memonitoring program dan kegiatan yang dilaksanakan

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

- a. Pemangku kepentingan pada bidang-bidang/PPTK kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.
- b. Tertunda kegiatan tidak sesuai jadwal disebabkan terkendala oleh kegiatan dan jadwal masing-masing instansi, sehingga tidak menutup kemungkinan tertundanya kegiatan.

[illegible]

3	Meningkatnya Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%	Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	1	Raker, raker sosialisasi bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi Meningkatnya persepsi yang sama tentang koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Jumlah peserta pembinaan/ sosialisasi	50 orang	TW I TW II TW III TW IV	- - 50 -
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - 30 -
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
4	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu	TW I TW II TW III TW IV	25% 25% 25% 25%	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	2	Monitoring dan evaluasi pendataan ormas, verifikasi faktual dan penerbitan SKT Tersedianya data ormas	Jumlah Ormas yang terdaftar	30 orang	TW I TW II TW III TW IV	- - - -
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
5	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi AKIP	TW I TW II TW III TW IV	- - A -	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Meningkatnya kebudayaan masyarakat dalam kehidupan beragama Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Terwujudnya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan stakeholder	Jumlah pertemuan FKUB	6 kali	TW I TW II TW III TW IV	- - 2 -
			TW I TW II TW III TW IV	- - A -						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
			TW I TW II TW III TW IV	- - A -						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
			TW I TW II TW III TW IV	- - A -						TW I TW II TW III TW IV	- - 1 2
6	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjut	TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Terwujudnya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan stakeholder	Jumlah peserta pertemuan sosialisasi	100 orang	TW I TW II TW III TW IV	100 - - -
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - - -
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - - -
			TW I TW II TW III TW IV	- - - 100%						TW I TW II TW III TW IV	- - - -

[illegible]

RENCANA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Internal	100%	665.437.435.-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	24.948.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	18.758.500,-
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersediannya barang cetakan dan pengandaan.	12 Bln	14.747.750,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Tersedianya peralatan Listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bln	4.368.245,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	4.914.000,-
Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12 bln	91.392.000,-
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	355.708.940,-
Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	9 org	150.600.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	247.066.000,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 jenis	62.000.000,-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	2 jenis	59.500.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 unit	41.795.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	13 unit	61.919.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 jenis	6.500.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 jenis	13.684.000,-
Pemeliharaan rutin/Berkala Meubeler	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 jenis	1.666.000,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	B 100%	52.833.550,-
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan dan dokumen Perencanaan tepat waktu.	5 dokumen	39.589.050,-
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset Barang daerah	Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu	1 dokumen	13.244.500,-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan potensi konflik yang ditangani	100%	343.790.550,-
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya rapat koordinasi laporan PULBAKET dan pemantauan	20 kali 2 dokumen	248.576.550,-
Kegiatan koordinasi pemantauan kegiatan orangasing,LSM, NGO, dan lembaga asing	Terlaksananya monitoring	4 kali	6.910.750,-
Sosialisasi peraturan /kebijakan pemerintah	Terlaksananya sosialisasi Jumlah peserta terlatih	3 kali 370 orang	88.303.250,-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pembinaan / Sosialisasi tentang wasbang dan kesadaran bela negara	100%	356.221.250,-
Sosialisasi Pendidikan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan sosialisasi	8 kali 2 kali	162.735.750,-
Sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara	Terlaksananya sosialisasi	150 org	35.736.000,-
Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	2 kali/ 135 org	57.749.500,-
Program Pendidikan politik masyarakat	Cakupan pelaksanaa pendidikan politik	70 %	283.593.050,-
Penyuluhan kepada masyarakat.	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pendidikan politik.	150 orang	44.802.100,-
Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah rapat tim pemantauan perkembangan politik Jumlah dokumen	6 kali 1 dokumen	31.263.750,-
Sosialisasi perundang-undangan bantuan keuangan parpol	Terlaksananya sosialisasi	70 orang	39.716.050,-
Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Pemilu	Tersosialisasinya regulasi tentang penyelenggaraan pemilu	250 orang	65.009.000,-
Pengukuran indeks demokrasi Indonesia	Diketahuinya statistik tingkat kemajuan demokrasi di kota Banjarbaru	4 dokumen	25.944.000,-
Dukungan pelaksanaan Pemilu	Terlaksananya penertiban atribut Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu serentak	100%	76.858.250,-

Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasarakatan dan Ekonomi	Persentase peran ormas yang aktif	80 %	298.456.250,-
Rakor, Raker, Sosialisasi bid ketahanan seni, agama, budaya, kemasarakatan dan ekonomi	Jumlah peserta pembinaan / Sosialisasi	50 orang	18.805.000,-
Monitoring dan Evaluasi Pendataan Ormas Verifikasi Faktual dan Penerbitan SKT	Jumlah Ormas yang terdaftar Laporan kegiatan	30 ormas 1 dokumen	67.194.000,-
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan FKUB terlaksananya sosialisasi	6 kali 2 kali/ 175 peserta	180.323.000,-
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah peserta pertemuan sosialisasi	100 orang	32.134.250,-
			2.147.398.085,-

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap menjelang dan setelah kegiatan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hambatan hambatan tidak terlaksananya kegiatan.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh bidang bidang yang dihimpun oleh PPTK SAKIP berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan SAKIP sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

KEPALA BADAN

Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP.19650908 198702 1 002